

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Cendekia Hukum* , 4 (2), 288-301.
- BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. (2020). *Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota (Km2), 2009-2019*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Daryanto, & Setyabudi, I. (2014). *Konsumen dan pelayanan prima*. Yogyakarta: Gava Media.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *PRO PATRIA Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik* , 4 (1), 34-52.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kormpaulun, D. A., & Melayaman, M. (2021). Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* , 1 (2), 78-88.
- Libna, Gani, A., & Martua, J. (2019). Tinjauan yuridis mengenai tugas dan kewajiban pelayanan publik tentang kewajiban pajak ditinjau dari hukum

administrasi negara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* , 5 (4), 114-120.

Linggi, R. K. (2020). Pelayanan Aparatur Kelurahan kepada Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. *Jurnal Paradigma* , 1 (3), 324-335.

Manurung, A. S., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* , 6 (1), 47-57.

Martua, J., & Rahmat. (2017). Peran Birokrasi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. *CITRA JUSTICIA: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan* , 18 (15), 1-7.

Melinda, I. Y., Asrinaldi, & Valentina, T. R. (2019). Akuntabilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Purus Kota Padang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)* , 5 (2), 95-105.

Pebriani, V., & Rohman, A. (2019). Analisis Inovasi Pelayanan Publik Gesit Aktif Merakyatnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (GAMPIL) Kota Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , 8 (1), 122-128.

Pemerintah Provinsi. (2016). *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi*. Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Gubernur No. 286. (2016). *Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi*. Jakarta: Plt. Gubernur DKI Jakarta.

Peraturan Menteri No. 18. (2016). *Perangkat Daerah*. Jakarta.

Permendagri No. 31 Tahun 2006. (2006). *Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.

- Purwadi. (2019). Analisis kualitas pelayanan di kantor Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung. *ENSAINS* , 2 (2), 113-119.
- Rahmadana, M. F., Siagian, A. T., Refelino, M. A., Tojiri, M. Y., Nugraha, V. S., Manullang, S. O., et al. (2020). *Pelayanan publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Republik Indonesia. (2003). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara .
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan*. Jakarta: Deputi Menteri Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. *JIMIA* , 11 (2), 56-65.
- Sarifuddin, & Famrizal, A. (2019). Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Pada Kantor Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu. *Jurnal Sinar Manajemen* , 6 (1), 68-78.

- Suharto, E. (2014). *Analisis kebijakan publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi dimensi pelayanan publik dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin. (2016). *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing*. Malang: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suprihatini, A. (2018). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Suyitno. (2018). *Metode penelitian kualitatif: konsep, prinsip dan operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Syaripudin, P. (2021). Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Justiciabellen* , 01 (01), 62-78.
- Thohir, M. S. (2019). *Hukum pembangunan reformasi perencanaan pembangunan nasional serta kebijakan dan pelayanan publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, teori dan teknik, analisis implementasi, kebijakan publik (studi implementasi program rencana strategis pembangunan kampung)*. Bandung: Nusa Media.
- Yanuarita, H. A., & Susanto, D. (2020). Menakar Pengaruh Modernisasi Dalam Implementasi Kebijakan Administrasi Pelayanan Publik Di Kota Kediri. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* , 12 (2), 112-121.